

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini dalam masa pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam perkembangannya senantiasa memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi kondisi keseimbangan perekonomian di Indonesia. Dampak yang dalam perkembangannya seringkali terjadi adalah ketimpangan (*disparity*) wilayah antar daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kondisi masing-masing yang menjadi faktor atas adanya ketimpangan, diantaranya latar belakang geografis, potensi sumber daya alam maupun manusia, dan potensi keuangan. Salah satu potensi yang menjadi faktor penting adalah potensi keuangan, potensi ini dilihat dari tingkat pendapatan daerah. Adanya perbedaan tingkat pendapatan inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan antar daerah. Adanya laju pertumbuhan ekonomi yang tanpa disertai dengan pemerataan memperparah keadaan ketimpangan wilayah tersebut.

Ketimpangan antar wilayah yang terjadi akibat potensi keuangan yang berbeda antar wilayah ini, menjadi salah satu dasar adanya kebijakan implikasi dari pemerintah yaitu kebijakan di sisi fiskal yaitu distribusi pendapatan yang disebut dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dibutuhkan mengingat pentingnya campur tangan pemerintah dalam memecahkan permasalahan

struktural perekonomian, dengan adanya kebijakan otonomi daerah pemerintah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah antar daerah di Indonesia.

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah telah diterapkan di Indonesia selama hampir dua dasawarsa. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimulai sejak adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah serta hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perubahan sistem pemerintahan, dari sistem sentralistis menjadi desentralisasi, mengandung arti adanya pengalihan sebagian besar wewenang pemerintahan yang semula dari pemerintahan pusat beralih ke pemerintahan daerah. Beberapa wewenang yang masih menjadi otoritas pemerintahan pusat diantaranya adalah wewenang di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, serta agama. Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Dengan prinsip dasar pelaksanaannya adalah "*Money Follows Function*", artinya fungsi pokok pelayanan publik beralih ke daerah, dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Setelah beberapa waktu penerapan, dikeluarkan revisi kedua yang secara resmi dituangkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Revisi undang-undang kedua ini mengatur lebih jauh

tentang berbagai permasalahan desentralisasi yang muncul sebelumnya diantaranya; belum jelasnya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, perbedaan persepsi antara pelaku proses pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, rendahnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, Terbatasnya kapasitas keuangan daerah, belum terbentuk secara efektif dan efisiennya kelembagaan pemerintah daerah, dan pemekaran wilayah yang belum sesuai tujuan. Pada pasal 5 UU No. 33 Tahun 2004, telah diatur sumber-sumber penerimaan daerah yang diantaranya adalah pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Dana Perimbangan keuangan Pusat-Daerah adalah mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah maupun sebaliknya yang diantaranya terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. Besar nominal PAD dan pembiayaan daerah bukan termasuk dana Perimbangan keuangan Pusat-Daerah karena termasuk pengelolaan fiskal daerah (Siagian, 2010)

Sementara pembiayaan daerah adalah anggaran khusus dimana mengatur tentang belanja pemerintah dalam suatu periode waktu, belanja daerah terbagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan yang kedua adalah belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut rincian data realisasi pendapatan dan

belanja provinsi seluruh Indonesia sesuai yang diatur dalam kebijakan otonomi daerah pada Tahun 2012-2015 berikut ini:

TABEL 1.1

**REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PROVINSI SELURUH
INDONESIA TAHUN 2008-2015 (MILIAR RUPIAH)**

		2012	2013	2014	2015
Penerimaan	PAD	86.542	101.596	121.451	127.497
	Dana Perimbangan	61.998	64.834	68.883	61.589
	Pendapatan lain yang sah	37.470	39.350	42.944	53.620
	Total Pendapatan	186.010	205.780	233.277	242.706
Pengeluaran	Belanja Tidak Langsung	101.469	109.748	123.768	143.168
	Belanja Langsung	77.977	94.001	96.677	103.886
	Total Belanja	179.446	203.749	219.336	247.042

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari Tahun 2012-2015 terus

mengalami peningkatan, Tahun 2012 pertumbuhan peningkatan hanya bertambah sekitar 10,63% dari Tahun 2011. Pada Tahun 2013 kenaikan terjadi sekitar 13,36, sedangkan Tahun 2015 mengalami kenaikan terendah yaitu hanya sekitar 4,04%. Meski mengalami penurunan angka pertumbuhan, angka pendapatan tetap mengalami kenaikan, peningkatan ini banyak sedikit disebabkan oleh naiknya penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah yang berupa retribusi daerah, dana perimbangan yang berupa bagi hasil pajak dan adanya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap perkembangan dasar penerimaan daerah yang ada. Beberapa provinsi terlihat signifikan terhadap kenaikan pendapatan daerah diatas diantaranya Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan angka PAD menunjukkan secara nyata bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Dana milik pemerintah provinsi secara maksimal dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Setelah adanya sistem anggaran berdasarkan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 bahwa belanja daerah dibagi menjadi 2 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum, realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun di seluruh Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dari Tahun 2012 dengan angka 179.446 miliar terus meningkat sampai dengan tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 247.042 miliar. Jika dilihat secara struktur, komponen belanja terbesar terdapat pada belanja pegawai yang memiliki posisi sebagai belanja tidak langsung sekaligus belanja langsung. Dilihat

dari realisasi pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2010 dan 2015 daerah mengalami defisit, secara umum defisit ini masih bisa diatasi dengan adanya pendapatan pembiayaan.

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi otonomi daerah yang telah secara luas, nyata dan bertanggung jawab yang saat ini telah memasuki era dimana kebijakan ini membawa bentuk perubahan baru dalam tata pemerintahan maupun kesejahteraan suatu daerah. Setelah memasuki dasawarsa kedua pelaksanaan desentralisasi memiliki banyak hasil yang memuaskan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, kebijakan ini telah banyak memberi kemajuan terutama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan pembangunan negara, Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan dengan menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah (Kemenkeu, 2012). Dengan ini maka kebijakan fiskal akan benar-benar memenuhi aspirasi, prioritas, dan kebutuhan daerah tersebut.

Desentralisasi fiskal timbul di berbagai negara dunia. Di negara-negara berkembang, desentralisasi dipilih karena berbagai faktor, diantaranya latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi diberbagai negara serta banyaknya kegagalan yang

dialami oleh pemerintahan sentralistik dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif (Kharisma, 2013).

Di Indonesia, luasnya wilayah serta bentuk geografis yang terdiri dari pulau-pulau yang berjarak cukup jauh satu sama lain inilah yang menyebabkan gagalnya pemerintahan sentralisasi di Indonesia. Tidak meratanya pembangunan dikala era sentralisasi menyebabkan banyak daerah-daerah yang terpencil yang kurang terjamah oleh pemerintah pusat. Wilayah-wilayah tersebut mengalami keterlambatan pembangunan yang akan berimbas pada rendahnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Meskipun pembangunan itu dilakukan, seringkali proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemerintah pusat akan merata-samakan pembangunan di daerah-daerah yang merupakan daerah dengan pendapatan yang sama tanpa mengetahui potensi yang dapat digali di daerah tersebut. Di masa pemerintahan orde baru, proses pembangunan yang dilaksanakan secara sentralistik, banyak mengalami in-efisiensi karena ketidakcocokan antara kebijakan proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan kebutuhan daerah. Inilah yang mendasari berakhirnya masa sentralisasi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan ribuan pulau serta perbedaan karakteristik yang menyertainya, tentu saja terdapat berbagai keragaman didalamnya termasuk potensi yang dimiliki. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. dengan kebijakan desentralisasi, setiap daerah diberikan kekuasaan untuk

mengelola kemampuan serta potensi-potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan sumber daya merupakan kunci dimana suatu daerah mampu mencapai tingkat kemandirian yang menjadi tujuan awal desentralisasi ini dijalankan. Setelah pelaksanaan desentralisasi, daerah-daerah di Indonesia diarahkan untuk menuju tingkat kemandirian pendapatan maupun pembiayaan.

Pulau Jawa memiliki karakter yang berbeda dengan pulau lain di Indonesia, 6 dari 10 kota besar di Indonesia berada di pulau Jawa, dengan jumlah penduduk rata-rata diatas 100.000, kota-kota tersebut menjadi kota besar dengan jumlah penduduk terbesar sekaligus pusat kegiatan ekonomi yang lebih maju dibanding dengan daerah lain. Jika menurut karakteristik sosiologis maupun geografis seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa memiliki karakter yang hampir sama, diantaranya dengan predikat pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, setiap provinsi memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia bahkan beberapa kota besar di luar Jawa sekalipun. DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia memegang peranan penting karena sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, konsentrasi penduduk akan mayoritas terarah ke provinsi ini. Selain Jakarta, Kota besar lain yang berada di pulau Jawa, seperti Bandung, Semarang, dan Surabaya menjadikan konsentrasi semakin terarah ke setiap provinsi di Pulau Jawa ini. Sebagai pulau dengan

penduduk terbesar, kebutuhan masyarakatnya pun juga besar. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, pemerintah akan mengadakan proyek pembangunan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Dari lebih lengkapnya fasilitas dan sarana prasarana di Pulau Jawa inilah proses pembangunan di Pulau Jawa meningkat begitu pesat sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa mengalami perkembangan ekonomi yang digambarkan melalui meningkatnya pendapatan per kapita yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa terus meningkat, menjadikan Pulau Jawa sebagai salah satu penyumbang tertinggi PDB Di Indonesia. Berikut data PDRB sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi:

TABEL 1.2

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 2000 MENURUT PROVINSI, 2012-2015 (MILIAR
RUPIAH)**

Provinsi	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
DKI Jakarta	449.805,4	477.285,3	1.373.389,5	1.454.102,1	411691
Jawa Barat	364752,4	386838,8	1149231,4	1207001,4	335270
Jawa	210848,4	223099,7	764992,6	806609,2	193987

Tengah					
DI Yogyakarta	23308,56	24567,48	79532,2	83461,5	21721
Jawa Timur	393662,9	419428,5	1262697	1331418,2	358126
Banten	99992,41	105856,1	349205,7	367959,2	91959

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016 (diolah)

Keenam provinsi memiliki PDRB yang bervariasi, terlihat Provinsi DKI Jakarta memiliki angka PDRB tertinggi dibanding dengan provinsi lain dengan rata-rata tertinggi sekitar 411.691 miliar Rupiah per tahun. Sedangkan Provinsi Yogyakarta memiliki terendah dibandingkan dengan Provinsi lain dengan rata-rata sekitar 21.721 miliar Rupiah per tahun.

Meskipun dalam angka pertumbuhan ekonomi keenam provinsi menunjukkan fluktuasi yang baik, terdapat hal yang selalu menyertai proses pembangunan yang sedang berlangsung, diantaranya adalah ketimpangan. Angka PDRB pada setiap daerah akan menunjukkan lebih lanjut, seberapa besar ketimpangan yang terjadi pada daerah atau wilayah tersebut. Pada hakekatnya, ketimpangan dalam proses pembangunan dalam hal ini distribusi pendapatan yang dapat dilihat dari perbedaan pendapatan antara kelompok-kelompok masyarakat, misalnya adanya kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi namun ada pula kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah atau masuk dalam golongan miskin (*poverty*) merupakan masalah yang banyak dihadapi

oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Karena itulah tidak mengherankan bahwa ketimpangan itu selalu pasti ada di Indonesia.

Karakteristik wilayah Indonesia yang tidak sama mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembangunan ekonomi sehingga karakteristik pembangunan ekonomi di Indonesia juga tidak akan sama di setiap wilayah Indonesia. Ketidaksamaan karakteristik inilah yang mempengaruhi kemampuan daerah tersebut untuk tumbuh. Hal ini yang menyebabkan ada daerah yang tumbuh dengan pesat dan baik sementara daerah lain mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan. Perbedaan kemampuan pertumbuhan inilah yang menyebabkan ketimpangan pembangunan maupun ketimpangan pendapatan daerahnya.

Ketimpangan yang terjadi berdasarkan beberapa faktor, tidak semata karena potensi yang kurang tergali saja. Rendahnya nilai pajak yang ada di daerah tersebut, sampai faktor sumber daya manusianya sendiri yang bisa dilihat dari angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga merupakan faktor ketimpangan. Kualitas sumber daya dapat langsung dilihat di angka tenaga kerja yang dimiliki daerah tersebut. Selain itu angka kemiskinan juga merupakan bukti konkret dari aspek kesejahteraan yang diharapkan dari adanya desentralisasi fiskal itu sendiri, semakin rendah angka kemiskinan yang dimiliki daerah tersebut maka akan semakin tinggi kesejahteraan di daerah tersebut.

Ketimpangan antar wilayah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga semakin rendah ketimpangan maka akan semakin

tinggi angka kesejahteraan masyarakat. Dengan mengukur angka ketimpangan maka dapat dilihat pula angka kesejahteraan dan kemandirian daerah tersebut. salah satu indeks yang bisa menjelaskan bagaimana ketimpangan terjadi adalah dengan indeks rasio gini,

Indeks rasio gini adalah salah satu cara penghitungan ketimpangan ketimpangan dari beberapa metode yang ada, indeks rasio gini Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Berikut adalah data indeks rasio gini pada keenam Provinsi :

TABEL 1.3

DATA INDEKS GINI RATIO PADA 6 PROVINSI PADA
TAHUN 2008-2015

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
JAKARTA	0.33	0.36	0.36	0.44	0.42	0.43	0.43	0.43
JAWA BARAT	0.35	0.36	0.36	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
JAWA TENGAH	0.31	0.32	0.34	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38
DIY	0.36	0.38	0.41	0.40	0.43	0.44	0.42	0.43
JAWA TIMUR	0.33	0.33	0.34	0.37	0.36	0.36	0.37	0.42

BANTEN	0.34	0.37	0.42	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah)

Dengan data diatas dapat dialanisis bahwa jika rata-rata angka koefisien berada di angka sekitar 0,3-0,4, dimana menurut kurva Lorenz termasuk ketimpangan rendah. Dari data indeks rasio gini diatas dan beberapa metode penghitungan ketimpangan lain, peneliti akan meneliti bagaimana ketimpangan ekonomi pada keenam provinsi di Pulau Jawa terjadi. Sementara itu, jika di pengukuran indeks gini mendapatkan perbandingan dengan kurva penegluaran kumulatif, maka angka lain yang dapat menjelaskan tingginya ketimpangan adalah Indeks Williamson yang dapat diperbandingkan dengan variabel-variabel desentralisasi fiskal, untuk mengukur seberapa besarkah dampak dari adanya desentralisasi fiskal terhadap angka ketimpangan wilayah antar daerah yang terjadi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik dengan bagaimana dampak desentralisasi fiskal yang diwujudkan dalam bentuk derajat desentralisasi fiskal sisi penerimaan, belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai bagian dari desentralisasi sisi pengeluaran, dan sebagai variabel pendukung adalah inflasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan wilayah yang terjadi pada keenam provinsi di Pulau Jawa yang relatif memiliki kondisi perekonomian yang diwujudkan dalam PDRB yang tinggi namun masih memiliki angka ketimpangan. Maka penulis, mengangkat penelitian berjudul; **“Dampak Desentralisasi**

Fiskal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Jawa pada Tahun 2008-2015”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini akan membahas bagaimana dampak dari kebijakan desentralisasi yang dicerminkan oleh derajat desentralisasi fiskal pada 6 provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur terhadap ketimpangan ekonomi pada setiap daerah.

Mengingat ketimpangan memiliki ruang lingkup yang luas sedangkan desentralisasi fiskal memiliki lingkup pada perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan peran pemerintah pusat dalam mengupayakan pemerataan melalui dana perimbangan. Maka penulis membatasi masalah dengan melihat melihat seberapa besar peran pengaruh antara derajat desentralisasi fiskal sisi penerimaan, realisasi belanja tidak langsung, realisasi belanja langsung, inflasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Dengan faktor-faktor diantaranya derajat desentralisasi fiskal yang diketahui melalui perbandingan antara PAD dan total penerimaan daerah, sedangkan ketimpangan wilayah diketahui melalui indeks Williamson yaitu dengan perbandingan antara PDRB dengan pendapatan perkapita provinsi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal penerimaan terhadap ketimpangan wilayah di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2015.
2. Bagaimana pengaruh belanja tidak langsung terhadap ketimpangan wilayah di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2015.
3. Bagaimana pengaruh belanja langsung terhadap ketimpangan wilayah di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2015.
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap ketimpangan wilayah di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2015.
5. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan wilayah di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2015.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat untuk penelitian ini maka, Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh belanja tidak langsung pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja langsung pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2015.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap ketimpangan wilayah di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2015.
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap ketimpangan wilayah di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2015.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, diharapkan memberikan sedikit atau banyak manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah pusat maupun pemerintah masing-masing provinsi, dapat dijadikan gambaran tentang pengaruh desentralisasi fiskal, besar realisasi belanja tidak langsung maupun belanja langsung, inflasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan dalam rangka penentuan kebijakan serta arah pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi baik daerah maupun nasional.

2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini memberikan sedikit banyak tambahan pengetahuan tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan serta variabel lain. Diharapkan kelak dapat membantu untuk penelitian-penelitian selanjutnya.